

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia pengiriman barang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Jasa pengiriman paket berupa barang juga sudah banyak macamnya. Seperti contohnya TIKI, JNE, J&T, WAHANA, SICEPAT, dsb. Tetapi sebelum berbagai macam jasa pengiriman paket yang saat ini tersedia, di Indonesia awalnya memakai jasa Pos Indonesia untuk mengirima paket berupa barang ataupun untuk mengirim uang. Pos Indonesia sangat diandalkan untuk mengirim paket untuk orang lain diberbagai daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 pengertian Pos itu sendiri adalah layanan komunikasi dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, serta layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 15 Tahun 2013, menyatakan Pos merupakan wujud serta fungsi pengangkutan yang berupa pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa.<sup>1</sup>

Pos Indonesia adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Saat ini, bentuk badan usaha PT. Pos Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut PT. Pos).<sup>2</sup> Pos Indonesia memiliki visi dan misi tersendiri. Visi tersebut adalah menjadi pilihan utama layanan logistik dan

---

<sup>1</sup> H. M. N. Purwotjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djamban. 2003. hlm. 2.

<sup>2</sup> [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id), pada 14 Agustus 2017, Pukul 08.11 WIB.

jasa keuangan. Sedang misinya adalah Memberikan solusi layanan logistik *e-commerce* yang kompetitif, Menjalankan fungsi *designated operator* secara profesional dan kompetitif, Memberikan solusi jasa layanan keuangan terintegrasi yang kompetitif dalam rangka mendukung *financial inclusion* berbasis digital, Memberikan solusi layanan dokumentasi dan otentikasi digital yang kompetitif.<sup>3</sup> Selain visi dan misi yang ingin dicapai, Pos Indonesia juga memiliki berbagai macam layanan produk untuk mendukung kelancaran pengiriman paket, antara lain:

#### 1. Pos Express<sup>4</sup>

Layanan Pos Indonesia yang menjadi unggulan karena pengiriman yang aman dan cepat dengan jangkauan luas keseluruh Indonesia. Layanan ini dapat dipilih untuk pengiriman dokumen, surat, ataupun paket barang. Layanan ini memiliki keunggulan tersendiri yaitu, tersedia diseluruh cabang Pos Indonesia, harga untuk jenis layanan ini juga terjangkau dan mampu bersaing dengan layanan lainnya, waktu pengiriman singkat.

#### 2. Pos Kilat Khusus

Layanan ini juga memiliki keunggulan yang tidak berbeda jauh dengan layanan paket sebelumnya. Jangkauan yang keseluruh Indonesai dan tersedia disemua cabang Pos Indonesia. Keunggulan lainnya adalah adanya jaminan dan asuransi penggantian untuk barang yang rusak atau

---

<sup>3</sup> <https://www.posindonesia.co.id/id/content/13>

<sup>4</sup> <https://www.posindonesia.co.id/id/content/25>

hilang. Tersedia layanan pick up service untuk pelanggan khusus, memiliki fitur lacak status kiriman.

### 3. Pos Jumbo Ekonomi

Ini merupakan layanan pos yang kiriman Pos Layanan dengan tarif berdasar berat pertama 3kg dan satu kilo berikutnya sampai dengan berat maksimal 30kg. Waktu pengiriman maksimal 14 hari. Terdapat juga bukti resi, jaminan ganti rugi, jejak lacak, dan adanya biaya tambahan untuk beberapa daerah.

### 4. Layanan Reguler

Layanan pengiriman dokumen dan barang domestik standar dengan jaringan terluas, melayani tujuan lokal, regional dan nasional. Waktu penyerahan maksimal 14 hari. Surat sampai dengan 2kg dan menggunakan prangko, paket sampai dengan 2kg dan diberi resi, adanya jaminan ganti kerugian.

### 5. Kargo

#### a. Kargo Ritel Train

Layanan pengiriman kargopos dalam negeri yang pengirimannya melalui transportasi kereta api dengan jalur yang telah disepakati POS dengan KALOG. Keunggulan layanan adanya resi, ganti rugi, jejak lacak. Berat paket mulai dari 5 kg sampai 70 kg.

#### b. Kargo Ritel Udara Dalam Negeri

Jangkauan nasional terbatas, resi menggunakan resi IPos.

Perjanjian pengiriman paket dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam perjanjian pengiriman paket tersebut pos indonesia selaku pelaku usaha telah membuat syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya didalam ketentuan yang ada. Saat sebelum melakukan proses pengiriman barang, pos indonesia memberikan formulir yang telah ditentukan isinya oleh pos indonesia dan pengirim tinggal memutuskan menerima atau tidak ketentuan yang dibuat oleh Pos Indonesia. Karena perjanjian tersebut ditentukan sepihak oleh Pos Indonesia maka perjanjian tersebut digolongkan perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri memiliki pengertian yaitu perjanjian yang isinya telah ditentukan serta dituangkan dalam formulir.

Dalam perjanjian pengiriman paket tersebut dilaksanakan berdasar asas kebebasan berkontrak konsumen atau pengirim berhak memilih setuju atau tidak dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Pos Indonesia tersebut. Apabila setuju pengirim dapat melakukan perjanjian pengiriman paket dengan Pos Indonesia. Perjanjian antara Pos Indonesia dengan pengirim dilakukan dimana pengirim harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pos Indonesia lalu menandatangani formulis tersebut. Akibat dari persetujuan timbullah hubungan hukum antara kedua belah pihak lalu menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila ada salah satu yang bersalah maka ia harus memberi tanggungjawab, bila kesalahan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan maka ia harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika kesalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab berdasar

perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pos Indonesia atau pengirim yang bersalah harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA POS INDONESIA DENGAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN PAKET”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perjanjian pengiriman paket antara Pos Indonesia dengan pengirim?
2. Bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pengiriman paket antara pos indonesia dengan pengirim.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi bagi penulis tentang tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

##### **2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dibidang hukum perdata mengenai perkara tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman barang bila salah satu melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

##### **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan supaya masyarakat menjadi paham dan sekaligus dapat menambah pengetahuan tentang salah satu kasus hukum yaitu tanggung jawab hukum Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman paket.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena yang akan diteliti adalah aspek hukum atau

kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman paket sehingga dapat diketahui legalitas tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman paket.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut penulis akan menggambarkan secara jelas dan teliti serta menyeluruh sistematis tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket.

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan yang akan diteliti, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu pengetahuan, jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier penelitian adalah kamus hukum.

### b. Data Primer

Data Primer diperoleh dari kantor Pos Indonesia di Sragen yang merupakan objek penelitian dan observasi lapangan.

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Pos Indonesia di Sragen.

#### 2) Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih subjek yang diteliti adalah dengan mencari informasi dari SDM kantor Pos Indonesia di Sragen yang dapat memberikan keterangan maupun informasi tentang tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:



a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang dijelaskan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tentang tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti, anata lain<sup>5</sup>:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data kasus yang ada hubungannya dengan penelitian yang ada di Pos Indonesia di Sragen.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan tentang suatu hal dalam penelitian yang terkait dengan tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket. Daftar pertanyaan disusun demi mempermudah penulis untuk melaukukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait penelitian tanggung jawab hukum Pos Indonesia dalam pengiriman paket.

---

<sup>5</sup> Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, hlm. 28

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu secara Normatif-Kualitatif. Karena menggunakan peraturan, buku-buku yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum antara Pos Indonesia dengan pengirim dalam melakukan pengiriman paket dipadukan dengan pendapat responden di lapangan lalu dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pos Indonesia
- B. Pengertian Pengiriman Paket
- C. Pengertian Perjanjian Pengiriman Paket
- D. Pihak-Pihak Dalam Pengiriman Paket
- E. Perjanjian Antara Pos Indonesian dan Pengirim Dalam Pengiriman Paket

F. Hubungan Hukum Antara Pos Indonesia dan Pengirim Dalam Pengiriman Paket

G. Hak Dan Kewajiban Antara Pos Indonesia dan Pengirim

H. Peraturan yang Dipakai Dalam Pengiriman Paket

I. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

J. Risiko dan Overmacht

K. Ganti Rugi

L. Berakhirnya Perjanjian

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Sejarah Pos Indonesia

2. Proses Perjanjian Pengiriman Paket antara Pos Indonesia dengan Pengirim

3. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA